

Catatan Atas Laporan Keuangan

Satuan Kerja BPTD WILAYAH X PROV. JATENG & D.I.Y SEMESTER II TA 2020

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020



*Jalan Abdul Rahman Saleh No. 142a Semarang
Jawa Tengah*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Satker 403869 adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I.Y. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surakarta, 30 September 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,



Eko Agus Susanto
NIP 19750916 200312 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapam Penting Lainnya	35



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek
Terminal Tirtonadi) Surakarta, 57134

Telp. (0271) 7471392
Fax. (0271) 7471392

Email : bptdjtengdiy@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : UM.002/12/3.1/BPTD-X/2021

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I.Y yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Kode Satker 403869 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 30 September 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X
Provinsi Jateng dan D.I. Yogyakarta



Eko Agus Susanto

NIP. 19750916 200312 1 008

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Triwulan III Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2021.

Realisasi Anggaran Belanja Negara pada Triwulan III TA 2021 adalah sebesar Rp 126,605,961,375.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2021.

Nilai Aset per 30 September 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp **1,069,503,368,774** yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp **199.228.685.214**; Aset Tetap (neto) sebesar Rp **1.069.503.368.774**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp **120.617.373.713**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar Rp **1.389.349.427.701**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2021 adalah sebesar Rp. 387.600.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp (95.867.871.907).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan defisit sebesar Rp. (95.857.149.597).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (95.857.149.597) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 1.485.505.233.843 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp. 1.389.049.427.701 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2021 adalah senilai Rp 1.389.049.427.701.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2021 SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI				
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0,00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	398.322.310	398.322.310	0,00
	2. HIBAH	0	0	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	398.322.310	398.322.310	0,00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	51.040.343.000	28.501.616.008	(22.538.726.992)	55,84
	Belanja Barang	92.844.257.000	49.851.806.203	(42.992.450.797)	53,69
	Belanja Modal	70.613.926.000	48.252.539.164	(22.361.386.836)	68,33
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00
	Subsidi	0	0	0	0,00
	Hibah	0	0	0	0,00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA (B I + B II + B III)	214.498.526.000	126.605.961.375	(87.892.564.625)	59,02
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0,00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.I + C.2)	0	0	0	0,00

II. NERACA

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2021
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	300.000.000
Persediaan	198.928.685.214
JUMLAH ASET LANCAR	199.228.685.214
ASET TETAP	
Tanah	312.359.305.927
Peralatan dan Mesin	259.074.210.397
Gedung dan Bangunan	657.264.902.657
Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.462.104.342
Aset Tetap Lainnya	7.770.502.472
Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.988.610.405
Akumulasi Penyusutan	(255.416.267.426)
JUMLAH ASET TETAP	1.069.503.368.774
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	3.251.490.400
Aset Lain-lain	233.873.286.675
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(116.505.579.500)
JUMLAH ASET LAINNYA	120.619.197.575
JUMLAH ASET	1.389.349.427.701
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	1.389.049.427.701
JUMLAH EKUITAS	1.389.049.427.701
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.389.049.427.701

III. LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2021
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA**

URAIAN	JUMLAH
1	3
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Pendapatan Negara Bukan Pajak	387.600.000
Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	387.600.000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	28.501.616.008
Beban Persediaan	406.853.507
Beban Barang dan Jasa	22.623.325.999
Beban Pemeliharaan	3.993.070.110
Beban Perjalanan Dinas	3.377.014.388
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	37.353.591.895
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	96.255.471.907
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(95.867.871.907)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10.722.310
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	10.722.310
POS LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	(95.857.149.597)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2021
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA**

URAIAN	JUMLAH
1	2
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(95.857.149.597)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Penyesuaian Nilai Aset	0
Penyesuaian Nilai Kewajiban	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7.727.526
Koreksi Lain-Lain	(606.384.071)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1.485.505.233.843
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1.389.049.427.701
EKUITAS AKHIR	1.389.049.427.701

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I.Y

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek Terminal Tirtonadi) Surakarta, 57134.

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan

akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 9 (sembilan) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 9 (sembilan) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 9 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam

Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan	50%

	pelunasan	
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa

Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp. 218,400,000.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Realisasi Belanja
Negara

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Instansi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 47.462.248.995 dari anggaran belanja sebesar Rp 199.376.830.000

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2021

URAIAN	2021		
	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG.
Belanja Pegawai	51.040.343.000	28.501.616.008	55,84
Belanja Barang	92.844.257.000	49.851.806.203	53,69
Belanja Modal	70.613.926.000	48.252.539.164	68,33
Total Belanja Kotor	199.376.830.000	126.605.961.375	59,02
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	199.376.830.000	126.605.961.375	59,02

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 28.501.616.008 dari anggaran belanja sebesar Rp 51.040.343.000.

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	% REAL ANGG.
1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji Pokok PNS	202,768,779,000	12,725,377,640	57.04
Belanja Pembulatan Gaji PNS	973,000	193,246	20.03
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,653,865,000	1,109,698,012	67.1
Belanja Tunj. Anak PNS	527,800,000	286,807,612	51.42
Belanja Tunj. Struktural PNS	34,200,000	25,155,000	74.59
Belanja Tunj. PPh PNS	670.727.000	134.678.752	20.08
Belanja Tunj. Beras PNS	1.015.335.000	473.409.540	46.63
Belanja Uang Makan PNS	3.465.348.000	798.456.000	23.04
Belanja Tunjangan Umum PNS	988.447.000	386.380.000	39.09
Jumlah Belanja Gaji dan Tunj. PNS	30.383.872.000	9.954.226.394	32.76
2. Belanja Lembur			
Belanja Uang Lembur	609.940.000	0	0,00
Jumlah Belanja Lembur	609.940.000	0	0,00
3. Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito			
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/ Kegiatan)	22.587.802.000	4.333.203.067	23.44
Jumlah Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	22.587.802.000	4.333.203.067	23.44
Total Belanja Kotor (1+2+3)	51.040.343.000	14.287.429.461	73.18
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai	51.040.343.000	14.287.429.461	26.66

Belanja Barang

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 30 September 2021 adalah Rp 49.851.806.203 dari anggaran belanja sebesar Rp 92.844.257.000.

URAIAN	30 September 2021
Belanja Keperluan Perkantoran	895.667.400
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.844.000
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	26.600.000
Belanja Barang Operasional Lainnya	43.347.000
Belanja Honor Output Kegiatan	168.196.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.975.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	454.118.432
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.005.189.846
Belanja Sewa	1.209.000.000
Belanja Jasa Profesi	10.800.000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91.848.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	703.911.221
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	262.282.697
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	395.713.896
Belanja Perjalanan Biasa	4.395.480.300
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	73.952.065
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	146.560.000
JUMLAH	10.889.485.857

Belanja Bantuan Sosial

B.5 Belanja Bantuan Sosial

NIHIL

Belanja Modal Tanah

B.6 Belanja Modal Tanah

NIHIL

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Triwulan III TA 2021 adalah sebesar Rp 48.252.539.164 dari anggaran belanja sebesar Rp 70.613.926.000.

URAIAN	30 Juni 2021
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.969.744.848
Jumlah Belanja Kotor	5.969.744.848
Pengembalian Belanja	0
JUMLAH BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	5.969.744.848

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan*

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Triwulan III TA 2021 adalah sebesar Rp 0

URAIAN	30 September 2021
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	0
Jumlah Belanja Kotor	0
Pengembalian Belanja	0
JUMLAH BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan Rp*

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NIHIL

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 300.000.000

*Kas di
Bendahara
Penerimaan*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

NIHIL

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

NIHIL

*Piutang
Bukan Pajak*

C.4 Piutang Bukan Pajak

NIHIL

*Bagian
Lancar TPA*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

NIHIL

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Pendek*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

NIHIL

Belanja
Dibayar di
Muka

C.8 Belanja Dibayar di Muka

NIHIL

Pendapatan
yang masih
harus diterima

C.9 Pendapatan Yang masih Harus Diterima

NIHIL

Persediaan

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2021 sebesar Rp 198.928.685.214 .
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

PERSEDIAAN	30 September 2021
Barang Konsumsi	836,969,534
Suku Cadang	8,488,370
Pita Cukai, Materai dan Legas	0
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	30,591,960,625
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	83,335,882,295
Jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	79,398,201,040
Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	4,756,694,000
Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	0
JUMLAH	198,928,685,214

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan sudah transfer keluar ke kode satker baru.

*Tagihan
TP/TGR*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
NIHIL

TPA

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran
NIHIL

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang
NIHIL

Tanah

C.14 Tanah
Nilai Tanah per 30 September 2021 adalah sebesar Rp
312.359.305.927 .

*Peralatan dan
Mesin*

C.15 Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2021
adalah Rp 259.074.210.397 .

*Gedung dan
Bangunan*

C.16 Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan bangunan per 30 September 2021 adalah sebesar Rp
657.264.902.657 .

*Jalan,
Jaringan
dan Irigasi*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Saldo jalan, irigasi, dan jaringan per 30 September 2021 adalah sebesar
Rp 35.462.104.342 .

*Aset Tetap
Lainnya*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 30 September 2021 adalah Rp 7.770.502.472.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 30 September 2021 adalah Rp 52.988.610.405 .

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2021 adalah sebesar Rp (255.416.267.426). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan.

*Aset Tak
Berwujud*

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 3.251.490.400

*Aset Lain-
Lain*

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 233.799.446.769

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya*

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 30 September 2021 adalah sebesar Rp (116.433.563.456)

*Uang Muka
dari KPPN*

C.23 Uang Muka dari KPPN

Jumlah uang muka dari KPPN per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 300.000.000.

*Utang kepada
Pihak Ketiga*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

NIHIL

*Pendapatan
Diterima di
Muka*

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

NIHIL

Ekuitas

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 1.389.049.427.701. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp 387.600.000

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak (UMUM/ NON FUNGSIONAL)	0	387.600.000	0
Jumlah	0	387.600.000	0

Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai per 30 September 2021 adalah sebesar Rp 28.501.616.008

*Beban
Persediaan*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp 406.853.507. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang
dan Jasa*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp 22.623.325.999. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

*Beban
Pemeliharaan*

D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp 3.993.070.110. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban
Perjalanan
Dinas*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp 3.377.014.388. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

NIHIL

*Beban Bantuan
Sosial*

D.8 Beban Bantuan Sosial

NIHIL

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp 37.353.591.895. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan

NIHIL

Piutang Tak

Tertagih

Beban Lain-lain

D.11 Beban Lain-lain

NIHIL

Surplus /Defisit

D.12 Kegiatan Non Operasional

dari Kegiatan

Non

Operasional

Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp. 10.722.310. Kegiatan Non Operasional adalah kelompok pendapatan atau beban yang sifatnya tidak rutin.

Pos Luar Biasa

D.13 Pos Luar Biasa

NIHIL

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0.

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp (95.857.149.597). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

NIHIL

Koreksi Aset Tetap

E.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp 7.727.526.

*Koreksi Atas
Beban*

E.5 Koreksi Atas Beban

NIHIL

*Koreksi Atas
Pendapatan*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

NIHIL

*Koreksi Hibah
Masuk/Keluar*

E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar

NIHIL

Ekuitas Akhir

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 1.389.049.427.701.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SK.020/KU.003/BPTD-X/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran dan Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta telah dilakukan penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran dan Keuangan yaitu:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Eko Agus Susanto
Pejabat Pembuat Komitmen	: 1. Taufiq Dwi P. 2. Wisnu Rizki Rakhmat 3. Idris 4. Ipang Prasajo 5. Basuki Triyono
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Tri Widiatno Kartanto
Bendahara Pengeluaran	: Lidya Larasati
Bendahara Penerimaan	: Prameswari Bayu O
Petugas Operator Simak	: Bethalica Widyanti R.R
Petugas Operator Saiba	: Moh Khoirudin Nawawi

**NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: LSAIKB
Tanggal : 05/11/21
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
WILAYAH/PROPINSI : 0356 KOTA SURAKARTA
SATUAN KERJA : 403869 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000
Persediaan	198,928,685,214
JUMLAH ASET LANCAR	199,228,685,214
ASET TETAP	
Tanah	312,359,305,927
Peralatan dan Mesin	259,074,210,397
Gedung dan Bangunan	657,264,902,657
Jalan, Irigasi dan Jaringan	35,462,104,342
Aset Tetap Lainnya	7,770,502,472
Konstruksi Dalam Pengerjaan	52,988,610,405
Akumulasi Penyusutan	(255,416,267,426)
JUMLAH ASET TETAP	1,069,503,368,774
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	3,251,490,400
Aset Lain-lain	233,799,446,769
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(116,433,563,456)
JUMLAH ASET LAINNYA	120,617,373,713
JUMLAH ASET	1,389,349,427,701
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	300,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	300,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN	300,000,000
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	1,389,049,427,701
JUMLAH EKUITAS	1,389,049,427,701
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,389,349,427,701

Surakarta, 30 September 2021

Kepala BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta



Eko Agus Susanto

NIP. 19750916 200312 1 008

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
 WILAYAH/PROPINSI : 0356 KOTA SURAKARTA
 SATUAN KERJA : 403869 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(95,857,149,597)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(598,656,545)
Penyesuaian Nilai Aset	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	(606,384,071)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	7,727,526
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,485,505,233,843
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,389,049,427,701
EKUITAS AKHIR	1,389,049,427,701

Surakarta, 30 September 2021

Kepala BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.
 Yogyakarta



Eko Agus Susanto

NIP. 19750916 200312 1 008

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ORGANISASI : 03 **DITJEN PERHUBUNGAN DARAT**
WILAYAH/PROPINSI : 0356 **KOTA SURAKARTA**
SATUAN KERJA : 403869 **BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X**

JENIS KEWENANGAN : KD **KANTOR DAERAH**

URAIAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	387,600,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	387,600,000
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	387,600,000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	28,501,616,008
Beban Persediaan	406,853,507
Beban Barang dan Jasa	22,623,325,999
Beban Pemeliharaan	3,993,070,110
Beban Perjalanan Dinas	3,377,014,388
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Hibah	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	37,353,591,895
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	96,255,471,907
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(95,867,871,907)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ORGANISASI : 03 **DITJEN PERHUBUNGAN DARAT**
WILAYAH/PROPINSI : 0356 **KOTA SURAKARTA**
SATUAN KERJA : 403869 **BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X**

JENIS KEWENANGAN : KD **KANTOR DAERAH**

URAIAN	JUMLAH
1	2
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,722,310
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,722,310
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	10,722,310
POS LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(95,857,149,597)

